



Public-Private Partnership (PPP) dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari

Public-Private Partnership (PPP) in the Development of Wukirsari Tourist Village

Nanda Ayu Fatmawati¹, Pandhu Yuanjaya²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 16-12-24

Diperbaiki 17-12-24

Disetujui 18-12-24

Kata Kunci:

PPP, Pemangku Kepentingan, Desa Wisata Wukisari

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahap *public-private partnership* dan faktor yang menjadi pendorong serta penghambat yang terjalin dalam pengembangan Desa Wisata Wukirsari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholders* yang terlibat terdiri dari pemerintah, swasta, instansi pendidikan, media, dan masyarakat sebagai pengelola. PPP didukung oleh potensi wisata, sumber daya manusia, pihak mitra, dan program. Pelaksanaan PPP di Wisata Kampung Batik Giriloyo terjadi pemutusan sepihak dari pihak PT Pertamina karena adanya pergantian jabatan yang menyebabkan program tidak dapat dilanjutkan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak Pertamina tidak konsisten dengan apa yang telah disepakati dalam perencanaan program. Sedangkan PPP antara pengelola Wisata Wayang Wukirsari dengan PT BCA terus berlanjut hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi *stakeholders* merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan program. PT Pertamina dan PT BCA berkedudukan sebagai *stakeholders* primer dan pemain kunci karena sebagai pemilik sumber daya utama. Sedangkan pengelola berkedudukan sebagai *stakeholders* sekunder dan subjek sebagai sasaran program. PPP di Desa Wisata Wukirsari telah memberikan dampak peningkatan perekonomian masyarakat dan berkontribusi terhadap pemasukan pendapatan desa.

ABSTRACT

Keywords:

PPP, *stakeholders*, Wukirsari Tourism Village

This study aims to describe the stages of public-private partnership and the factors that drive and inhibit the development of Wukirsari Tourism Village. This study uses a qualitative descriptive analysis approach. Data in this study were obtained using observation, interview, and documentation techniques. The results of the study indicate that the stakeholders involved consist of the government, private sector, educational institutions, media, and the community as managers. PPP is supported by tourism potential, human resources, partners, and programs. The implementation of PPP in Giriloyo Batik Village Tourism was unilaterally terminated by PT Pertamina due to a change of position which caused the program to not be continued. This shows that Pertamina is not consistent with what has been agreed upon in the program planning. Meanwhile, the PPP between the managers of Wukirsari Wayang Tourism and PT BCA continues until now. This shows that stakeholder consistency is an important factor that greatly influences the sustainability of the program. PT Pertamina and PT BCA are in the position of primary stakeholders and key players because they are the owners of the main resources. While the manager is in the position of secondary stakeholders and subjects as program targets. PPP in Wukirsari Tourism Village has had an impact on improving the community's economy and contributed to village income.

1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengemukakan bahwa sektor pariwisata menjadi penghasil devisa terbesar kedua setelah kelapa sawit [1]. Pada tahun 2023 pariwisata menyumbangkan devisa sebesar 10,46 miliar dolar AS dan total pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp1.050 triliun untuk nilai tambah ekonomi kreatif dan 17,38 miliar dolar AS untuk nilai ekspor [2]. Kontribusi tersebut merupakan hasil dari pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata hingga menjadi destinasi yang banyak dikunjungi baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Salah satu destinasi wisata yang menjadi tujuan wisatawan untuk dikunjungi adalah Yogyakarta [3]. Menurut hasil survei *Goodstats*, penyebab Yogyakarta menjadi destinasi tujuan wisatawan adalah karena memiliki banyak pilihan wisata, memiliki keindahan alam yang beragam, serta budaya peninggalannya yang masih dijaga dan dilestarikan hingga sekarang. Jumlah kunjungan wisatawan di Yogyakarta sempat mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, namun setelah itu terus mengalami kenaikan sejak tahun 2021 hingga 2023.

Tabel 1. Jumlah Wisatawan Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Wisatawan (orang)		
	Nusantara	Mancanegara	Jumlah
2019	6.116.354	433.027	6.549.381
2020	1.778.580	69.968	1.848.548
2021	4.279.985	14.740	4.294.725
2022	6.427.035	47.080	6.474.115
2023	7.601.275	149.414	7.750.689

Sumber: Bappeda DIY (2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengunjung wisatawan Yogyakarta mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 dengan jumlah 7.750.689 kunjungan. Dari jumlah kunjungan tersebut, *Length of Stay* (LOS) atau jangka waktu wisatawan menetap di suatu hotel atau penginapan adalah 1,7 hari [4]. Kenaikan jumlah kunjungan dan LOS tersebut merupakan tujuan dari pengembangan pariwisata. Pemerintah daerah Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata terus berupaya untuk terus melakukan pembangunan pariwisata dengan memfokuskan pada tiga faktor yang terdiri dari *attraction*, *amenities*, dan *aces*. *Attraction* dilakukan dengan meningkatkan daya tarik wisata, *ameniteis* dengan meningkatkan sarana pengunjung, dan *acees* melalui peningkatan infrastruktur serta akomodasi. Harapannya akan semakin banyak mendatangkan pengunjung karena semakin banyak pula uang yang akan dibelanjakan oleh wisatawan.

Selain pemerintah, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pembangunan pariwisata. Hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata. Peraturan tersebut merupakan pendekatan *bottom*

up yakni masyarakat tingkat desa desa diberi peran dalam mengidentifikasi berbagai potensi yang ada didaerahnya dan berkedudukan sebagai pengelola utama potensi tersebut. Masyarakat dilibatkan dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan [5]. Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan potensi yang ada di pedesaan melalui partisipasi masyarakat lokal. Namun disisi lain masyarakat desa belum memiliki cukup sumber daya untuk menjalin jejaring, kompetensi, tenaga ahli, dan uang sehingga itu menjadi *barrier* pembangunan kerja sama dengan pihak lain.

Yogyakarta terbagi menjadi Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Dari berbagai wilayah tersebut Kabupaten Bantul merupakan daerah yang dikenal dengan potensi pariwisata yang lengkap, mulai dari potensi alam, buatan, dan budaya. Berbagai potensi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun desa wisata. Salah satunya adalah masyarakat Kalurahan Wukirsari dengan potensi alam dan potensi budaya berupa kerajinan batik tulis dan tatah sungging wayang. Dalam mengembangkan potensi tersebut diperlukan berbagai komponen mulai dari *event*, *marketing* dan jaringan pemasaran, kependudukan, dan yang tidak kalah penting adalah pengadaan fasilitas infrastruktur [Wawancara, 22 Januari 2024]. Namun pemerintah maupun masyarakat memiliki keterbatasan pengetahuan, sumber daya manusia, dan anggaran sehingga perlu melibatkan pihak lain yang lebih *experienced* untuk membantu memenuhi komponen. Pihak tersebut dapat berasal dari perusahaan dan praktisi industri, akademisi, dan media [Wawancara, 22 Januari 2024]. Pihak swasta merupakan pihak yang potensial untuk dilibatkan dalam pembangunan karena memiliki berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh pemerintah, terutama dana dan program [6].

Pemerintah pusat memiliki program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam peraturan tersebut memuat kewajiban pelaksanaan TJSL bagi setiap perseroan baik itu milik swasta maupun negara. Hal ini memberikan peluang perusahaan melaksanakan TJSL dengan masyarakat desa sebagai sasaran programnya. Salah satu contohnya adalah program TJSL yang dilakukan oleh PT Pertamina dan PT BCA di Desa Wisata Wukirsari. PT Pertamina melakukan program TJSL berupa *Public-Private Partnership* (PPP) kepada Wisata Kampung Batik Giriloyo. Sedangkan PT Pertamina melakukan program PPP kepada Wisata Wayang Wukirsari.

Informasi yang diperoleh dari wawancara kepada salah satu pengelola, PPP yang terjalin antara PT Pertamina dengan Wisata Kampung Batik Giriloyo hanya berjalan satu tahun. Hal tersebut tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian kerja sama [Wawancara, 9 September 2024]. Dalam kontrak kerja sama program akan dijalankan dalam jangka waktu tiga tahun hingga pengembangan galeri batik. Kejadian ini sangat disayangkan bagi pihak pengelola karena apabila kerja sama terus berlanjut maka Wisata

Kampung Giriloyo akan mendapatkan lebih banyak keuntungan berupa bantuan anggaran yang diperkirakan mencapai 2,5 miliar rupiah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai tahap PPP yang dijalankan di Desa Wisata Wukirsari. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai kerja sama yang dijalankan di Desa Wukirsari dari segi tahap PPP menggunakan teori dari Sulistiyani [7] dan segi *stakeholders* selaku pelaksana. Selain itu penelitian juga akan menjawab pertanyaan mengenai apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat PPP di Desa Wisata Wukirsari. Harapannya hasil penelitian ini dapat menciptakan program PPP yang berkelanjutan dan tidak lagi terdapat permasalahan dalam tahapan program PPP.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian metode pendekatan kualitatif analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian dengan memahami dan mengeksplorasi suatu permasalahan sosial dan kemanusiaan. Kemudian dilakukan analisis deskriptif dengan menggambarkan berbagai situasi, kondisi, fenomena, dan realitas di lapangan [8]. Hasil analisis disajikan menggunakan gambar dan kata-kata. Dalam penelitian dilakukan analisis mengenai tahapan PPP yang dilakukan dalam pengembangan Desa Wisata Wukirsari serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam tahapan tersebut.

Penelitian dilakukan di Desa Wisata Wukirsari dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Di Desa Wisata Wukirsari dilakukan di dua lokasi wisata, yakni Wisata Kampung Batik Giriloyo dan Wisata Wayang Wukirsari. Penelitian dilakukan sejak Juni 2024 – September 2024. Penelitian dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti [9]. Sedangkan instrumen pendukung lainnya terdiri dari pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder [10]. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pertama di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, data pusat statistik, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian [11]. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*, yakni berdasarkan pada karakteristik, ciri kriteria, dan sifat tertentu terhadap permasalahan yang akan diteliti [12]. Informan terdiri dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Wukirsari, Ketua pengelola Wisata Kampung Batik Giriloyo serta Wisata Wayang Wukirsari, dan pengunjung wisata. Setelah proses pengumpulan data, dilakukan pemeriksaan keabsahan dan validitas. Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data perpanjangan pengamatan dan triangulasi sumber [13]. Kemudian dilakukan analisis data menggunakan model Miles, Huberman, & Saldana yang terdiri dari

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [14].

3. Pembahasan

PPP merupakan salah satu bentuk *partnership* yang terjalin antara pihak *public* dan *private*. PPP dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam hal pengetahuan, penyediaan anggaran, dan tenaga ahli. Dalam skema ini, swasta berperan sebagai penyedia sumber daya untuk mendukung program pembangunan. Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan untuk terlibat dalam pembangunan negara. Salah satu contoh program TJSL adalah PPP yang dilakukan oleh PT Pertamina dan PT BCA dalam pengembangan Desa Wisata Wukirsari.

Desa Wisata Wukirsari merupakan pariwisata di pedesaan yang dikelola berdasarkan potensi wisata budaya batik tulis dan tatah sungging wayang. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat [15]. Selain PT Pertamina dan PT BCA, pengembangan Desa Wisata Wukirsari juga dilakukan oleh beberapa *stakeholders* lainnya mulai dari pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat sebagai pengelola utama wisata. Berbagai *stakeholders* tersebut menjalankan perannya masing-masing, mulai dari pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator [16]. Adapun program PPP yang dijalankan dalam rangka mengembangkan Desa Wisata Wukirsari dirumuskan secara bersama berdasarkan permasalahan yang ada di lokasi wisata. Pada bagian pembahasan ini akan diuraikan mengenai tahapan PPP yang dilakukan oleh PT Pertamina dan PT BCA dalam pengembangan Desa Wisata Wukirsari menggunakan teori dari Sulistiyani (2021).

3.1 *Contex* (Konteks)

Tahap *contex* merupakan proses identifikasi masalah dan perumusan perencanaan program PPP yang akan dijalankan [7]. Dalam tahap ini dirumuskan titik keberhasilan dan tujuan yang ingin dicapai melalui PPP serta merencanakan program untuk mencapai tujuan tersebut. Permasalahan yang ingin diselesaikan di Wukirsari adalah pembentukan wisata, pengadaan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan promosi. Di sisi lain terdapat pihak mitra yakni PT Pertamina dan PT BCA yang memiliki program *partnership* dengan sasaran Desa Wisata Wukirsari. Keduanya merupakan perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kerangka perencanaan program PPP dibentuk dengan menciptakan situasi yang menguntungkan bagi seluruh *stakeholders* yang terlibat [17]. PT Pertamina melakukan PPP di Wisata Kampung Batik Giriloyo dengan rencana jangka waktu tiga tahun. Program yang diberikan adalah pembangunan

infrastruktur, yang terdiri dari pemasangan papan nama objek wisata, pembangunan toilet, musala, tempat pewarnaan, dan limasan. Sedangkan PT BCA melakukan PPP di Wisata Wayang Wukirsari dengan program pembentukan desa wisata, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya pengelola melalui pelatihan, dan promosi. Di sisi lain keuntungan yang diperoleh PT Pertamina dan PT BCA adalah telah menunaikan TJSJL kepada masyarakat sehingga tidak mendapatkan sanksi. Hal ini dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 ayat 3. Kemudian keduanya diperbolehkan mencantumkan nama perusahaan di infrastruktur yang diberikan, hal tersebut merupakan promosi perusahaan atau *branding* kepada pengunjung.

Perencanaan pembangunan infrastruktur di Wisata Kampung Batik telah disepakati bahwa pada tahun pertama akan dilakukan pemasangan papan nama objek wisata, toilet, musala, tempat pewarnaan, dan limasan. Kemudian pembangunan akan dilanjutkan dengan pengembangan galeri batik. Mekanisme pembangunan disepakati bahwa akan dilakukan dengan menyerahkan langsung kepada pihak kontraktor. Sedangkan perencanaan PPP di Wisata Wayang Wukirsari diawali dengan pengadaan lahan. Pada saat itu pihak Kalurahan Wukirsari memberikan lahan kas desa sebesar 8000 meter² yang berlokasi di Padukuhan Pucung. Kemudian direncanakan bahwa pembangunan akan dimulai dari penimbunan lahan kemudian dilanjutkan dengan membangun joglo, toilet, pendopo, dan kantor sekretariat. Pada awalnya mekanisme pembangunan dilakukan dengan pemberian dana secara langsung, namun PT BCA memutuskan untuk menyerahkan pembangunan kepada pihak kontraktor. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur dengan tepat waktu.

Konteks merupakan tahap yang dilakukan dalam menentukan perencanaan program PPP. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tahap ini mencakup penentuan permasalahan yang ingin diselesaikan melalui PPP dan perencanaan program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan yang akan diselesaikan berupa pembentukan wisata, pengadaan infrastruktur, pengembangan pengelola, dan promosi. Selain dari segi program, dalam tahap ini juga perlu melakukan pembentukan komitmen dari masing-masing *stakeholders* yang terlibat. Nantinya kedua hal tersebut yang akan menentukan keberhasilan program. Apabila perencanaan telah dilakukan dengan baik dan hubungan keduanya juga terjalin dengan baik maka dapat meminimalisasi adanya permasalahan pada tahap selanjutnya.

3.2 *Input* (Masukan)

Tahap *input* terdiri dari analisis faktor pendukung, pengadaan kontrak kerja sama atau MoU, dan pembagian peran dari masing-masing *stakeholders* yang terlibat. Program PPP di Desa Wisata Wukirsari didukung oleh berbagai hal mulai dari potensi wisata, sumber daya manusia yang terdiri dari masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak mitra. Sumber potensi yang dimanfaatkan menjadi desa wisata adalah potensi alam dan budaya berupa batik tulis dan

tatah sungging wayang. Di Kalurahan Wukirsari terdapat 829 warga yang berprofesi sebagai perajin batik dan wayang. Beberapa diantaranya merupakan bagian dari pengurus dan pengelola wisata. Kemudian terdapat pihak pemerintah mulai dari tingkat desa, tingkat kabupaten terdiri dari Dinas Pariwisata serta Dinas Permodalan Kabupaten Bantul, dan tingkat pusat yakni Kememparekraf dan Kementerian Perindustrian. Selain itu juga terdapat pihak dari instansi pendidikan berupa universitas.

Stakeholders membentuk program PPP kemudian menuangkannya kedalam MoU. Peran dari MoU dianggap sangat penting dalam sebuah hubungan PPP karena sebagai pengikat para *stakeholders* yang terlibat agar menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Apabila diperlukan, legalitas MoU tersebut dapat ditingkatkan sehingga dapat dianggap menjadi hubungan hukum [18]. Komponen penting yang harus ada dalam MoU adalah jangka waktu pelaksanaan program dan pembagian peran [19]. PT Pertamina memberikan jangka waktu tiga tahun kepada Wisata Kampung Batik Giriloyo. Sedangkan PT BCA memberikan jangka waktu MoU selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 66 yang menyebutkan bahwa beberapa laporan, salah satunya tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaporkan oleh direksi dalam agenda RUPS yang dilaksanakan setiap tahun.

PT Pertamina dan PT BCA berperan sebagai pelaksana program PPP dan fasilitator. Hal ini disebabkan karena pihak keduanya merupakan penyedia sumber daya utama berupa dana dan tenaga ahli [16]. Sedangkan pengelola Wisata Kampung Batik Giriloyo dan Wisata Wayang berperan sebagai akselerator karena berperan dalam memberikan dukungan untuk memperlancar jalannya program. Kemudian berbagai pihak yang terlibat disebut sebagai implementor karena memiliki peran dalam program PPP sesuai kapasitas masing-masing.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong program PPP di Desa Wisata Wukirsari adalah potensi wisata, sumber daya manusia, program, dan MoU. Dalam tahap ini diperlukan pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholders*. Hal tersebut merupakan upaya dalam menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara perusahaan dan pengelola wisata.

3.3 *Process* (Proses)

Pelaksanaan program PPP di Wisata Wayang telah berjalan secara berkelanjutan sejak tahun 2014 hingga sekarang. MoU diperbarui setiap tahun setelah agenda pertemuan dengan syarat terdapat progres dalam jumlah pengunjung dan pemasukan. Sedangkan PPP di Wisata Kampung Batik Giriloyo tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dan MoU yang telah disepakati. Dalam MoU menyatakan bahwa PPP akan dilaksanakan selama tiga tahun. Namun PPP hanya berjalan selama satu tahun dengan pembangunan

infrastruktur senilai 600 juta rupiah dari tiga miliar rupiah yang telah dijanjikan. Pemutusan sepihak dari PT Pertamina disebabkan karena adanya pergantian jabatan.

Pemutusan sepihak yang dilakukan oleh PT Pertamina kepada Pengelola Wisata Kampung Batik Giriloyo menunjukkan bahwa PT Pertamina merupakan *stakeholders* yang berkedudukan sebagai pemain kunci (*key players*). Hal tersebut karena dalam program PPP memiliki kekuasaan untuk melanjutkan atau memberhentikan program [20]. Pemain kunci dianggap sebagai *stakeholders* tertinggi karena memiliki sumber daya utama yang diperlukan dalam program PPP, yakni dana dan tenaga ahli. Pemutusan sepihak oleh PT Pertamina tidak dapat dianggap sebagai tindakan menyalahi hukum, namun tindakan tersebut dinilai kurang etis karena telah melanggar MoU yang telah disepakati. Di sisi lain pihak pengelola Wisata Kampung Batik Giriloyo dan Wisata Wayang Wukirsari berkedudukan sebagai subjek (*subjects*). Hal tersebut disebabkan karena keduanya merupakan sasaran dari program PPP.

Pelaksanaan PPP sangat bergantung pada pihak yang berkedudukan sebagai *stakeholders* primer dan pemain kunci karena memiliki wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu diperlukan adanya konsistensi terutama bagi *stakeholders* primer dan pemain kunci. Konsistensi dapat dicapai dengan membangun hubungan komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik akan menyebabkan kemunduran kualitas para *stakeholders* [17]. Diperlukan adanya komunikasi yang jelas mengenai tujuan dan kewajiban di antara *stakeholders* sehingga dapat mempertahankan komitmen dalam menjalankan program PPP.

Pembangunan infrastruktur dalam program pengembangan Desa Wisata Wukirsari dilakukan berdasarkan pola *community based provision* yakni program berasal dari aspirasi masyarakat [21]. Pembangunan infrastruktur ditentukan oleh pihak pengelola berdasarkan fasilitas yang dibutuhkan di lokasi wisata, seperti pembangunan toilet dan musala di Wisata Kampung Batik Giriloyo serta gedung pertunjukan di Wisata Wayang. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pihak mitra kemudian diserahkan kepada pengelola membentuk pola *Build, Transfer and Operate* (BTO) [19]. Tahap *build* (pembangunan) infrastruktur dilakukan oleh PT Pertamina, PT BCA, dan Kementerian Perindustrian dengan menyerahkan kepada pihak kontraktor. Seluruh infrastruktur yang ada di Desa Wisata Wukirsari merupakan hasil pembangunan dari program PPP dengan pihak eksternal masyarakat Wukirsari. Kemudian *transfer* (pengalihan) dan *operate* (pengoperasian) merupakan tahap dimana infrastruktur selesai dibangun kemudian diserahkan oleh pihak mitra kepada pihak pengelola wisata untuk digunakan sesuai dengan fungsinya demi mengembangkan wisata. Pengadaan infrastruktur di Desa Wisata Wukirsari tidak hanya menguntungkan bagi pengelola, pihak mitra juga dapat diuntungkan melalui *branding* dengan mencantumkan nama perusahaan atau instansi di bangunan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tahap PPP di Desa Wisata Wukirsari telah berjalan dengan baik walaupun terdapat salah satu masalah mengenai keberlanjutan program. Kemudian pihak yang berkedudukan sebagai *stakeholders* primer memiliki dampak paling besar dalam tahap PPP. Diperlukan adanya konsistensi dari berbagai *stakeholders*, hal tersebut dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang jelas dan terus-menerus.

3.4 *Output* (Keluaran)

Output merupakan capaian yang diperoleh dari program PPP berdasarkan yang telah ditentukan dalam perencanaan di tahap *context*. Bentuk dari hasil pencapaian dapat berupa infrastruktur atau program kegiatan. Pemutusan sepihak yang dilakukan oleh PT Pertamina kepada Wisata Kampung Batik Giriloyo menyebabkan pembangunan hanya berjalan hingga tahap pertama, yakni pemasangan papan nama objek wisata, pembangunan toilet, musala, tempat pewarnaan batik, dan pembangunan limasan. *Output* yang diperoleh dari PPP dengan PT Pertamina senilai sekitar 600 juta rupiah atau hanya $\frac{1}{4}$ dari nilai yang dijanjikan dalam tahap perencanaan. Pada awalnya pihak Pertamina tidak menyatakan mengenai pergantian jabatan yang menyebabkan pemutusan program. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin antara pihak Pertamina dan pihak pengelola kurang interaktif dan bersifat sporadis atau musiman [17]. Setelah itu pihak pengelola memutuskan untuk menutup nama Pertamina di papan objek wisata dengan kain. Tindakan tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap PT Pertamina karena memutuskan PPP tanpa adanya konfirmasi dan sebagai tanda bahwa sudah tidak ada hubungan kerja sama dalam bentuk apa pun dengan Pertamina.

Pelaksanaan PPP di Wisata Wayang Wukirsari telah menghasilkan *output* sesuai dengan yang telah disepakati dalam perencanaan. PT BCA memberikan bangunan infrastruktur yang terdiri dari joglo utama, kantor sekretariat, toilet, pendopo, musala, dan gedung pertunjukan. Kemudian dalam program pengembangan sumber daya pengelola, PT BCA memberikan banyak pelatihan dengan tema *leadership*, *team building*, pramuwisata, *marketing*, dan pelayanan *homestay*. Terdapat lebih dari 20 pelatihan yang telah diberikan oleh PT BCA. Kemudian dalam program promosi, PT BCA selalu melibatkan pengelola Wisata Wayang dalam setiap kegiatan pameran dan pagelaran baik tingkat nasional ataupun internasional. Kemudian Wisata Wayang juga dimasukkan ke dalam ekosistem BCA melalui *e-catalog* yang disebar ke seluruh cabang BCA dan *mobile banking* BCA.

Kunci dari keberhasilan hubungan PPP antara PT BCA dan Pengelola Wisata Wayang Wukirsari adalah komunikasi yang baik. Komunikasi terjalin antara pihak BCA melalui PAC Cabang Yogyakarta yang disambut baik oleh pihak pengelola Wisata Wayang. Komunikasi tersebut juga terjalin secara terus-menerus karena dalam PPP ini PT BCA dianggap sebagai mentor oleh

pihak pengelola. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wondirad [17] bahwa kesuksesan pengembangan wisata dapat dicapai apabila terdapat konsistensi dan saling bergantung sehingga sapat menimbulkan kepercayaan bagi para *stakeholders* yang terlibat.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa PPP di Desa Wisata Wukirsari dipengaruhi oleh komunikasi, konsistensi, dan komitmen dari *stakeholders* primer atau pemberi program. Kurangnya interaksi dan komitmen dari PT Pertamina dan Wisata Kampung Batik Giriloyo mengakibatkan hasil program tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, sementara hubungan yang baik dan konsisten di antara PT BCA dan pengelola Wisata Wayang Wukirsari menghasilkan *output* sesuai yang direncanakan, yakni pembentukan wisata, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pengelola melalui berbagai pelatihan, dan promosi melalui media sosial maupun kegiatan lainnya.

3.5 *Outcome* (Hasil)

Outcome merupakan tahap dimana telah terdapat dampak jangka panjang dari *output* yang dihasilkan melalui program PPP. Dampak tersebut dapat berupa manfaat dari pembangunan infrastruktur atau program kegiatan yang telah diberikan. Selain itu *outcome* juga dapat dianggap sebagai hasil akhir dari suatu penyelesaian suatu permasalahan. PPP yang dilakukan oleh PT Pertamina dan PT BCA telah menyelesaikan berbagai permasalahan di Desa Wisata Wukirsari mulai dari pembentukan wisata, keterbatasan infrastruktur, pembinaan pengelola, hingga promosi. Selain menyelesaikan masalah, salah satu tujuan yang harus dicapai dalam program pengembangan pariwisata pedesaan adalah kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan PERGUB DIY Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung. PPP merupakan upaya dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menyediakan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tidak semua hasil kerajinan dititipkan di galeri batik yang disediakan di Wisata Kampung Batik Giriloyo dan *showroom* yang ada di Wisata Wayang Wukirsari. Banyak perajin yang menjual hasil kerajinannya secara mandiri di kediaman masing-masing. Peningkatan jumlah pengunjung yang ada di Desa Wisata Wukirsari diharapkan semakin memberikan peluang wisatawan untuk berbelanja hasil kerajinan batik tulis dan wayang. Selain itu masyarakat yang memiliki tempat usaha dan penginapan juga dapat diuntungkan dengan kunjungan wisatawan.

PPP juga telah terbukti meningkatkan kenyamanan pengunjung adalah dengan memberikan kelengkapan fasilitas utama dan fasilitas pendukung (*ancillary*), seperti tempat ibadah dan toilet. Kelengkapan fasilitas akan memberikan peluang untuk diselenggarakan *event* di lokasi wisata. *Event* tersebut dapat menambah pemasukan pengelola melalui pemesanan konsumsi

dan penginapan. Bagi pengelola Wisata Wayang Wukirsari, berbagai pelatihan yang telah diberikan oleh BCA mampu meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam mengadakan *event* baik di dalam maupun luar kegiatan wisata. Hal ini menjadi salah satu penyebab pengelola Wisata Wayang dapat *survive* ketika Pandemi Covid-19.

PPP juga memberikan kontribusi terhadap pemerintahan desa. Area yang digunakan sebagai lokasi wisata merupakan lahan kas milik desa, maka sistem yang digunakan adalah sewa lahan. Setiap tahunnya pengelola membayarkan uang sewa kepada kalurahan yang nominalnya ditentukan oleh pihak kalurahan. Hal ini tersebut merupakan bentuk kontribusi pihak wisata untuk memberikan kontribusi terhadap pemasukan Kalurahan Wukirsari Bantul. Selain itu kalurahan juga mendapatkan pemasukan dari redistribusi sebesar 500 rupiah dari setiap pengunjung Wisata Kampung Batik Giriloyo. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa program PPP di Desa Wisata Wukirsari telah menunjukkan keberhasilan berupa peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian masyarakat dan berkontribusi terhadap pendapatan pemasukan desa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan PPP di Desa Wisata Wukirsari dapat ditarik kesimpulan bahwa PPP yang dijalankan oleh PT Pertamina dan PT BCA merupakan program TJSL. PPP antara PT Pertamina dan Wisata Kampung Batik Giriloyo tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, sedangkan PPP antara PT BCA dan pengelola Wisata Wayang Wukirsari berjalan secara berkelanjutan sejak tahun 2014 hingga sekarang. Selain dari kedua perusahaan terdapat pula peran dari pihak *public*, yakni pemerintah dan instansi pendidikan.

Dampak yang dihasilkan dari PPP di Wisata Kampung Batik Giriloyo lebih kepada kepuasan dan kenyamanan pengunjung karena pembangunan yang diberikan merupakan fasilitas pendukung. Sedangkan dampak dari PPP di Wisata Wayang Wukirsari lebih luas karena tidak hanya mencakup pengadaan fasilitas saja melainkan juga peningkatan keterampilan pengelola dan promosi wisata. Program PPP PT BCA di Wisata Wayang lebih berpengaruh pada peningkatan jumlah kunjungan wisata dibandingkan dengan program PPP dari PT Pertamina di Wisata Kampung Batik Giriloyo.

Dari berbagai tahap yang telah dilaksanakan dalam program PPP di Desa Wisata Wukirsari dapat disimpulkan bahwa konsistensi dari *stakeholders* dapat dijadikan sebagai faktor pendorong dan penghambat dalam tahap PPP. Apabila konsistensi dari berbagai *stakeholders* berjalan baik maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pendorong keberhasilan program, begitu pula sebaliknya. Bentuk program PPP juga berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan program. Dalam PPP berupa tanggung jawab sosial kepada masyarakat, bentuk program yang tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur lebih berpotensi untuk berjalan dengan baik dan berdampak pada sasaran program. Hingga pada akhirnya telah

dibuktikan bahwa PPP di Desa Wisata Wukirsari telah memberikan kesejahteraan melalui peningkatan perekonomian masyarakat dan berkontribusi terhadap pendapatan pemasukan desa.

Referensi

- [1] <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190319084140-17-61460/bi-pariwisata-bisa-jadi-penyumbang-devisa-terbesar-kedua>, diakses pada Februari 2024.
- [2] <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-jumpa-pers-akhir-tahun-kemenparekraf-paparkan-capaian-kinerja-di-sepanjang-2023>, diakses pada Juli 2024.
- [3] <https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/40112/yogyakarta-kota-terbaik-tujuan-wisata-berdasar-survei-goodstats/>, diakses pada Juli 2024.
- [4] https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/216-jumlah-kamar-hotel-tingkat-hunian-kamar-hotel-dan-rata-rata-lama-tinggal, diakses pada Juli 2024.
- [5] Sunarko & Sri. (2017). Kerjasama Sister City: Sebuah Upaya Untuk Meningkatkan Industri Pariwisata di Banyuwangi. *Jurnal Hukum Internasional*, 6(2): 221– 234.
- [6] Noor, M., Falih, dan Antun. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung.
- [7] Sulistiyani, A. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- [8] Creswell, J. and Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 5th edn*. London: Sage Publication Ltd.
- [9] Anggito, A. dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- [10] Kuncoro, M. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- [11] Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- [12] Nasution, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative.
- [13] Ratnaningtyas *et al.* (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- [14] Miles, M., Michael Huberman, & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- [15] Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata.
- [16] Nugroho, R. (2018). *Public Policy Edisi Keenam*. Yogyakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [17] Wondirad, A., Tolkach, and King (2020). Stakeholder Collaboration as a Major Factor for Sustainable Ecotourism Development in Developing Countries. *Tourism Management*, 78: 1 – 56.
- [18] Puspitasari, I. & Budi. (2018) Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta dengan Pola (BOT) *Build Operate Transfer* dalam Pembangunan Jalan Tol (Studi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo). *Law Reform*, 14(1), 57 – 73.
- [19] Kyei & Albert (2021). *International Best Practices of Public-Private Partnership. In International Best Practices of Public-Private Partnership*. Springer Nature Singapore.
- [20] Freeman, R. (2001). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. New York: Cambridge University Press.
- [21] Fatmawati. (2011). Kemitraan dalam Pelayanan Publik: Sebuah Penjelajahan Teoritik. *Jurnal Ilmu Pemerintah*. 1(2), 91 – 101.

